# **BAB II**

# **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

## **Perbankan Indonesia**

Sejarah perkembangan bank di Indonesia dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan. Banyak hal yang terjadi hingga bisa terbentuk bank yang ada saat ini.

### Masa Sebelum Kemerdekaan

Menurut Bank Indonesia (2007) awal perkembangan bank di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan VOC. Setelah mengalami beberapa kali kebangkrutan, akhirnya muncullah *De Javasche Bank* yang didirikan pada tahun 1828, yang merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indondesia. Pada saat pemerintahan Jepang, hanya satu bank yang diakui yaitu Bank Rakyat Indonesia atau dalam Bahasa Jepangnya *Syomin Ginko,* sementara *De Javasche Bank* dikuasai oleh pihak Jepang. Tak lama setelah merdeka pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank.*

### Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1966)

Rizal (2008) mengatakan di awal kemerdekaan Indonesia memiliki dua bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Selain itu terdapat empat bank swasta nasional, yaitu Bank Surakarta MAI di Solo, Bank Indonesia di Palembang, Bank Dagang Nasional di Medan, dan *Indonesian Banking Corporation* di Yogyakarta. Dengan meningkatnya rasa nasionalisme dan hasrat kemerdekaan dari rakyat di wilayah Federal, maka bermunculan pula bank-bank swasta nasional yang umumnya merupakan bank umum dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan.

### Masa Orde Baru (1966-1998)

Secara umum pembangunan ekonomi dan nasional menjadi prioritas pada masa orde baru dalam mengendalikan masa depan bangsa Indonesia dan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penataan kembali perbankan dan BI merupakan prioritas bagi awal pelaksanaan program orde baru (Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2007). Guna meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, BI memperkenalkan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka) pada tahun 1970 yang melengkapi Deposito Inpres 1968. Selain itu, BI juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada tujuh bank pemerintah untuk membiayai program kredit dalam rangka mobilisasi dana masyarakat. BI dengan dukungan pemerintah pada tahun 1971–1972 melaksanakan kebijakan Program Penertiban Bank Swasta Nasional dengan sasaran untuk mengurangi jumlah bank swasta nasional dan memperkuat bank yang ingin tetap melanjutkan kegiatannya.

Menurut Bank Indonesia (2008) pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972. Akibat Pakto 88, mulai 1997 perkembangan usaha perbankan menjadi lebih sulit dikendalikan.

### Masa Reformasi: Krisis Moneter dan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia

Awal Juli 1997, terjadi gejolak nilai tukar yang memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan upaya yang semula dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada perbankan ternyata oleh masyarakat ditanggapi secara negatif dan mengakibatkan masyarakat melakukan penarikan dan pengalihan dana secara besar-besaran. (Mudjijah et al., 2019). Pemerintah yang kekurangan dana meminta bantuan kepada Bank Indonesia untuk melakukan program penjaminan terlebih dahulu yang kemudian dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank umum sekaligus melakukan upaya-upaya penyehatan perbankan. Kemudian ada program rekapitalisasi yang memberikan dampak meningkatnya BLBI untuk menutup kewajiban pemerintah kepada nasabah atau kreditur bank yang di-BBKU (Bank Beku Kegiatan Usaha).

### Masa Reformasi: Sistem Perbankan Modern

Ginting (2017) mengatakan untuk mewujudan struktur perbankan yang stabil, BI bersama dengan pemerintah merancang Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam skenario API, bank-bank diwajibkan memperkuat permodalannya sesuai dengan lingkup operasionalnya yang berarti semakin luas lingkup operasionalnya maka semakin besar pula permodalan yang dipersyaratkan. Dengan demikian bank-bank kecil yang selama ini rentan terhadap gejolak, terus didorong untuk menjadi besar.

Setelah struktur perbankan mulai stabil, pemerintah mulai mencoba mengembangkan sistem perbankan agar semakin canggih. *Electronic Banking (E-Banking)* merupakan…..

Menurut Margaretha (2015), terdapat tiga jenis *e-banking*, yaitu:

1. *Internet banking*
2. *Mobile banking (M-banking)*
3. *Phone banking*

## ***Mobile Banking (M-banking)***

## ***Individual Differences***

Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Sementara karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan bisa berasal dari pola asuh orang tua dan budaya. Dalam konteks penggunaan *mobile banking,* terdapat dua variabel *individual differences* yang berkaitan yaitu *personal innovativeness* dan *m-banking knowledge.*

### *Personal Innovativeness*

### *M-banking Knowledge*

## **Literasi Keuangan**

Literasi keuangan sebagai salah satu literasi dasar yang menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan (Kemdikbud, 2017).

Prinsip dasar literasi keuangan yaitu:

1. Keutuhan (holistik) unsur-unsur literasi finansial bersinergi dengan lima literasi dasar yang lain, dengan kecakapan abad ke21.
2. Keterpaduan (terintegrasi) dengan kompetensi, kualitas karakter dengan lima literasi dasar lainnya. Keterpaduan dengan berbagai ranah, baik sekolah, keluarga, dan masyarakat.
3. Responsif terhadap kearifan lokal dan ajaran religi yang ada di Indonesia. Berisi muatan yang mempertimbangkan kearifan lokal dan ajaran religi yang sangat beragam di Indonesia.
4. Responsif kesejagatan: mempertimbangkan, tanggap, dan memanfaatkan hal-hal yang berkenaan dengan literasi finansial yang berasal dari mana saja (bersifat universal).
5. Inklusif: merangkul semua pihak dengan terbuka dan setara; membuka kesempatan atau peluang serta kemungkinankemungkinan yang berasal dari pihak lain.
6. Partisipatif: melibatkan, mendayagunakan, memanfaatkan berbagai pemangku kepentingan literasi finansial, dan berbagai sumber daya yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan.
7. Kesesuaian perkembangan psikologis, sosial, dan budaya: bahanbahan, program, dan kegiatan literasi finansial selaras dengan perkembangan individu, perkembangan sosial, dan budaya yang melingkupi atau menaungi individu.
8. Keberlanjutan: seluruh program, kegiatan, dan hasilnya harus berlanjut dan saling menopang.
9. Keakuntabelan semua program, kegiatan, dan hasil literasi finansial harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan literasi serta bisa diakses dan dikaji kembali oleh pihak lain.

Menurut OJK (2013) tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

### Pengetahuan Keuangan

### Perilaku Keuangan

### Sikap Keuangan

## **Inklusi Keuangan**

Dungey, Mardi (2018) mengatakan dengan inklusi keuangan datanglah kesempatan untuk menabung, baik untuk kebutuhan modal masa depan dan keadaan darurat, merencanakan, dan memperluas peluang. Karakteristik ini berlaku tidak hanya untuk orang miskin, tetapi juga untuk mereka yang tidak masuk negara yang lebih maju.

Beberapa manfaat inklusi keuangan:

1. Mendukung stabilitas sistem keuangan
2. Meningkatkan efisiensi ekonomi
3. Mendukung ekspansi pasar keuangan
4. Menyumbangkan potensi pasar baru bagi perbankan
5. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara berkelanjutan

Menurut Bank Indonesia (2017), indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan.

1. Akses/ketersediaan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya. Indikator ini terdiri dari:
2. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
3. Jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
4. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
5. Penggunaan, yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan. Indikator ini terdiri dari:
6. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk.
7. Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa.
8. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registered) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD).
9. Persentase kredit/ pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal.
10. Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa.
11. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat.
12. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.
13. Kualitas, yaitu mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator ini terdiri dari:
14. Indeks literasi keuangan.
15. Jumlah pengaduan layanan keuangan.
16. Persentase penyelesaian layanan pengaduan.

## **Pengembangan Hipotesis Penelitian**

### Dampak *Personal Innovativeness* terhadap Inklusi Keuangan

### Dampak *M-banking Knowledge* terhadap Inklusi Keuangan

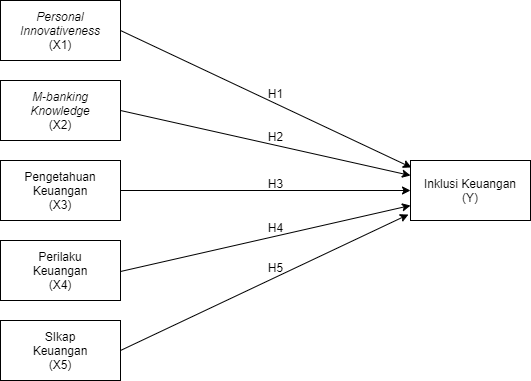
### Dampak Pengetahuan Keuangan terhadap Inklusi Keuangan

### Dampak Perilaku Keuangan terhadap Inklusi Keuangan

### Dampak Sikap Keuangan terhadap Inklusi Keuangan

## **Penelitian Terdahulu**

## **Kerangka Pemikiran Teoritis**



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: Penulis